

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang ideal karena menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta memberi ruang partisipasi dalam proses politik. Dalam perkembangan pemikiran demokrasi modern, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan semata, tetapi juga sebagai sistem yang membuka ruang keterlibatan warga negara dalam berbagai bentuk praktik politik (Noer, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya demokrasi tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sepenuhnya setara. Prinsip *government by the people* yang memberi kesempatan luas bagi warga negara untuk memilih dan dipilih justru dapat memunculkan celah bagi terbentuknya konsentrasi kekuasaan dalam lingkup tertentu, salah satunya melalui fenomena politik kekerabatan atau dinasti politik. Dalam sistem demokrasi elektoral, terpilihnya anggota keluarga petahana tetap di anggap sah karena didasarkan pada suara rakyat. Akan tetapi, meskipun berlangsung melalui prosedur yang demokratis, praktik dinasti politik menyimpan sejumlah risiko bagi kualitas demokrasi.

Dinasti politik berpotensi menimbulkan distorsi demokrasi karena akses terhadap kekuasaan tidak lagi bersaing secara setara. Dampak lanjutannya adalah melemahnya prinsip meritokrasi, terbatasnya regenerasi kepemimpinan, serta

meningkatnya risiko penyalahgunaan kekuasaan karena mekanisme kontrol politik cenderung melemah dalam lingkaran elite yang saling terhubung.

Politik dinasti secara garis besar dapat diartikan sebagai pengendalian kekuasaan dalam sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh sekumpulan orang yang masih terikat dalam hubungan darah atau keluarga (Maydani dkk., 2024). Menurut Fitriyah (2020) politik dinasti merujuk pada fenomena di mana anggota keluarga dari pejabat petahana atau elite politik terlibat dalam kontestasi politik lokal melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga praktik ini menjadi pola pewarisan kekuasaan keluarga dalam jabatan publik. Dalam demokrasi praktik politik dinasti sudah banyak terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tidak setaranya distribusi kekuasaan yang mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik.

Negara demokrasi sejatinya perlu mengupayakan untuk terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Namun dengan adanya politik dinasti telah menghambat partisipasi masyarakat karena adanya ketidakadilan yang timbul karena perbedaan status sosial. Para keluarga petahana jauh lebih diuntungkan dalam hal ini. Politik dinasti merusak prinsip demokrasi yang mana pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Huntington (1983) negara bisa disebut demokratis ketika suatu negara memiliki sistem pemilihan yang dilakukan secara rutin.

Menurut Asshidique (2009) terdapat empat tujuan penyelenggaraan pemilu, pada intinya pemilu memberikan gambaran mengenai: Mewujudkan

peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat, dan juga melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Namun pemilu menjadi celah munculnya politik dinasti, karena terdapat banyak praktik yang dilakukan untuk meloloskan dinasti politik, salah satunya adalah oligarki partai politik yang berkuasa. Menurut Nur Rahmah & Maulia (2024) oligarki partai politik bisa dikatakan penyebab utama kemunduran dalam mekanisme pencalonan kandidat untuk maju di kontestasi pemilihan umum. Karena menurut Rahmanto (2018) pencalonan kandidat cenderung dilakukan dengan pengambilan keputusan yang sentralistik oleh para elit penguasa partai. Seharusnya partai politik melakukan mekanisme yang demokratis dalam menentukan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan. Tidak hanya berdasar keputusan para elit yang berada di partai.

Di Indonesia juga terjadi praktik politik dinasti. Melihat dari orde lama sampai saat ini praktik politik dinasti masih terjadi. Dimulai dari keluarga keluarga politik seperti Soekarno. Bisa dilihat dari anak-anak Soekarno yang mengikuti jejak Soekarno sebagai politisi, seperti Megawati Soekarnoputri. Yang mana juga memperlihatkan politik dinasti pula kepada anaknya yaitu Puan Maharani. Kemudian Gus Dur juga menunjukkan praktik politik dinasti dengan munculnya saudara kandung dan anak-anaknya ke dalam politik. Politik dinasti juga dapat ditemukan pada keluarga SBY dengan majunya Edhie Baskoro, yaitu

anak kandungnya sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Hal ini menunjukkan kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya adalah suatu hal yang biasa dalam penyaluran kekuasaan politik di Indonesia bagi anggota keluarga yang terlibat dalam politik, baik sebagai pejabat maupun pemegang jabatan penting dalam partai politik.

Indonesia sebagai negara yang demokratis seharusnya memastikan proses politik tetap terbuka dan mengikutsertakan seluruh warga Indonesia dengan adil dalam politik kewarganegaraan. Adanya politik dinasti di Indonesia memicu banyak perdebatan. Terdapat harapan untuk kedepannya perubahan positif dengan terpilihnya pemimpin yang bukan dari keluarga elit politik. Karena dengan adanya politik dinasti dikhawatirkan adanya penurunan kualitas demokrasi. Melihat pada isu hangat saat ini, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam politik merupakan suatu ketidakseimbangan akses politik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bukan hanya memperlihatkan terkait ketidaksetaraan dalam akses politik tetapi juga mengancam esensi dari prinsip demokrasi itu sendiri. Yang mana demokrasi seharusnya mewakili kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir orang, juga bukan kepentingan keluarga elit saja.

Praktik politik dinasti di Indonesia juga sudah merambah ke lini demokrasi lokal. Pada tingkat kabupaten banyak praktik politik dinasti yang ditemukan. Politik dinasti sudah menjadi budaya dalam pemilihan kepala daerah. Para pelaku politik dinasti menganggap membawa keluarganya dalam ranah politik merupakan cara efektif untuk melanggengkan kekuasaannya. Politik dinasti pada

ranah pemilihan kepala daerah masih dipengaruhi oleh nama besar dan popularitas calon. Masyarakat cenderung memilih calon yang sudah dikenal tanpa melihat kualitas dan integritas calon, meski popularitas dan nama besar tidak bisa menjamin kemampuan calon untuk memimpin dan memajukan daerah menjadi lebih baik.

Praktik politik dinasti pada ranah lokal menunjukkan peningkatan sejak tahun 2005 saat pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan di Indonesia. Menurut data yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan dari 37 provinsi yang menyelenggarakan pilkada, 33 provinsi memiliki peserta yang terafiliasi dengan dinasti politik. Kemudian penelitian terbaru yang dilakukan oleh Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya berkolaborasi dengan Election Corner FISIPOL Universitas Gadjah Mada dan pusat Riset Politik dan Pemerintahan PolGov UGM, menunjukkan terdapat 605 kandidat dengan latar belakang dinasti politik yang ikut dalam pilkada tahun 2024. Dari 605 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik, terdapat sebanyak 384 kandidat yang mencalonkan sebaagai kepala daerah di tingkat provinsi dan kotamadya atau kabupaten. Kemudian 221 kandidat lainnya mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah. Yoes Kenawas menyebutkan praktik politik dinasti tersebar di 65,59% dari 545 daerah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2024. Rinciannya tersebar di 28 pemilihan gubernur dan 324 pemilihan bupati/walikota (Wawan S, 2024).

Dari data yang telah dikumpulkan penulis, ditemukan 26 pemenang atau sebesar 38,24% dari kandidat pemilihan gubernur yang terafiliasi dinasti politik,. Dan kandidat yang kalah berjumlah 42 atau sebesar 61,76% dari jumlah kandidat. Data ini menunjukkan bahwa afiliasi dinasti politik tidak secara otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian, keberadaan kandidat dinasti yang tetap mampu memenangkan kontestasi menunjukkan bahwa jaringan kekerabatan politik masih memiliki ruang dan peluang dalam proses elektoral.

Tabel 1. 1 Daftar Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Jawa Tengah yang terkait Politik Dinasti

No.	Kabupaten/Kota	Nama Calon	Nama Patron	Hubungan Kekerabatan
1.	Brebes	Paramitha Widya Kusuma	Indra Kusuma	Ayah - Anak
2.	Banjarnegara	Amalia Desiana	Budhi Sarwono	Ayah - Anak
3.	Purbalingga	Fahmi Muhammad Hanif	Rofik Hananto	Ayah - Anak
4.	Rembang	Mohammad Hanies Cholill Barro'	KH M Cholil Bisri	Ayah - Anak
5.	Kebumen	Lilis Nuryani	Yahya Fuad	Suami-Istri
6.	Pekalongan	Achman Afzan Arslan Djunaid	Achmad Alf Arslan Djunaid	Kakak - Adik
7.	Sukoharjo	Etik Suryani	Wardoyo Wijaya	Suami-Istri
8.	Surakarta	Respati Achmad Ardianto	Akbar Tandjung	Paman - Keponakan
9.	Purworejo	Yuli Astuti	Kelik Sumrahadi	Suami-Istri

Sumber: Diolah oleh penulis

Politik dinasti seringkali dinilai memberi dampak buruk terhadap dinamika politik lokal. Sebagai contoh praktik politik dinasti keluarga Sutrisno di Kabupaten Kediri, di mana kekuasaan birokrasi digunakan untuk mengokohkan kekuatan politik dinasti melalui distribusi sumber daya kepada para klien dan

jaringan politiknya (Haliim & Hakim, 2020). Kebijakan yang dibentuk tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat tetapi hanya diciptakan untuk menguntungkan keluarga Sutrisno dan menjaga loyalitas jejaring kekuasaan keluarga. Berbagai kerabat dan relasi keluarga dari level lokal hingga daerah mendapatkan imbalan dalam bentuk jabatan maupun akses pada proyek pembangunan strategis sehingga memperkuat pola patron-klien dalam struktur politik daerah (Haliim & Hakim, 2020).

Namun terdapat temuan yang menunjukkan bahwa dampak politik tidak sepenuhnya negatif. Studi Cahyaningtyas tentang politik dinasti di Kabupaten Kediri pada masa pemerintahan Haryanti, istri pertama dari kepala daerah petahana yang telah menjabat dua periode sebelumnya. Pada pemerintahannya terdapat persepsi positif warga Desa Pare Lor terhadap kinerja pemerintah daerah karena adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan, bantuan pembangunan fasilitas keagamaan, dan berbagai program yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat (Cahyaningtyas & Affandi, 2018).

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang terdapat praktik politik dinasti. Etik Suryani berhasil terpilih menjadi Bupati Sukoharjo pada pilkada tahun 2024. Sebelumnya Etik juga memenangkan Pilkada 2020 setelah suami Etik yaitu Wardoyo menjabat selama dua periode sebelumnya. Etik Suryani bersama Eko Sapto Purnomo berhasil memenangkan pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai pasangan tunggal dengan total suara 319.923 yaitu sebesar 66,8% dari suara sah dan kotak kosong mendapatkan suara sebesar

159.256 atau 33,2% suara sah. Sebelum terpilih menjadi Bupati Sukoharjo Etik memiliki karir di dunia perbankan dan menjabat sebagai kepala cabang.

Pada pilkada 2024 Etik Suryani bersama Eko Sapto Purnomo membawakan visi dan misi program unggulan yaitu Sukoharjo Lebih Maju Adil dan Bermartabat. Kemudian terdapat 5 misi yang dijanjikan Etik untuk mewujudkan visi yang ia bawa. Antara lain mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berkualitas melalui transformasi digital serta program kampung pintar. Misi kedua, membangun SDM cerdas, sehat, produktif, dan responsif gender dengan program beasiswa, pencegahan stunting, dan Sukoharjo Juara. Ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Smart Farming, UMKM naik kelas, dan revitalisasi irigasi serta infrastruktur pertanian. Keempat, menyediakan infrastruktur jalan mulus, penataan kota, perbaikan kawasan kumuh, penerangan jalan, dan rumah layak huni. Kelima, memperkuat nilai agama dan gotong royong melalui umroh gratis, Sukoharjo Mengaji, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta bantuan sarana keagamaan. Dengan visi dan misi tersebut Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024.

Etik Suryani merupakan salah satu aktor yang terkait dengan praktik politik dinasti. Etik berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Sukoharjo. Tentunya tiap masyarakat Sukoharjo memiliki persepsi masing masing terhadap Etik Suryani dan praktik politik dinasti. Rakhmat (D. A. Putri, 2024) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Stimulus yang menimpa seseorang melalui panca indera menyebabkan proses persepsi tersebut berlangsung. Tetapi terdapat rangsangan yang tidak mendapat respon karena proses seleksi yang dilakukan terhadap rangsangan tersebut. Dalam proses persepsi seseorang dapat memberikan pandangan positif maupun negatif tergantung latar belakang yang dimiliki. Proses inilah yang memberikan kecenderungan penilaian dan pandangan seorang masyarakat untuk memberi penilaian dan pandangan sehingga berdampak pada penentuan pilihan politiknya.

Dari pernyataan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti persepsi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap politik dinasti Etik Suryani yang memenangkan pilkada tahun 2024. Alasan apa yang membangun persepsi masyarakat Kabupaten Sukoharjo sehingga memilih Etik Suryani yang diduga terkait dinasti politik, dan bagaimana cara pandang masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam melihat dinasti politik. Persepsi masyarakat inilah yang dapat mengukur dan memberikan penilaian etis terhadap suatu perbuatan politik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Sukoharjo terhadap dinasti politik?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Sukoharjo terhadap kepemimpinan Etik Suryani sebagai Bupati Kabupaten Sukoharjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap dinasti politik.
2. Menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap kepemimpinan Etik Suryani sebagai Bupati Sukoharjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang dinasti politik di tingkat lokal, khususnya melalui perspektif dinasti politik dan *elite capture*. Dengan meneliti bagaimana masyarakat menilai tokoh dari dinasti politik yang kembali terpilih tanpa lawan, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kekuasaan elite, persepsi publik, dan legitimasi kepemimpinan di daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana kekuasaan elite dan politik dinasti memengaruhi pilihan politik dan kualitas demokrasi lokal, sehingga dapat

meningkatkan kesadaran kritis masyarakat dalam memilih pemimpin pada masa datang.

2. Bagi kalangan akademisi. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur dalam studi ilmu politik dan pemerintahan, khususnya dalam topik persepsi publik terhadap kepemimpinan lokal, *elite capture*, dan keberlanjutan kekuasaan dinasti di tingkat daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membantu penulis dalam menganalisis dinasti politik pada pemilihan daerah. Beberapa hasil penelitian seperti jurnal penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka, diantaranya:

Pertama, artikel Nilam Cahyaningtyas & Mohammad Arif Affandi, dengan judul: “Politik Dinasti di Kabupaten Kediri: “Pertukaran Sosial Tim Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang” dalam Jurnal Paradigma Volume 06 Nomor 01 Tahun 2018. Penelitian ini membahas pertukaran sosial tim pemenang Bupati Haryanti - Masykuri dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kemenangan Bupati Haryanti - Masykuri di Kediri melibatkan transaksi politik, yaitu pemberian bantuan material kepada warga sebagai imbalan dukungan suara, yang memperkuat dinasti lokal.

Kedua, Artikel karya Pradita dkk yang berjudul “Dinamika Keterwakilan Politik dalam Politik Dinasti: Studi Kasus Dominasi Elit pada Era Ratu Atut Banten”, Triwikrama: Jurnal Multidisplin Ilmu Sosial Volume 7 Nomor 6 Tahun 2025. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana dinasti politik Ratu Atut Choisyah di Provinsi Banten menguasai akses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah dan jabatan politik lainnya melalui mekanisme *elite capture*. Hasil penelitian artikel ini menemukan bahwa keluarga Atut memanfaatkan kekuasaan, sumber daya ekonomi, dan jejaring birokrasi partai politik untuk memastikan regenerasi kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga.

Ketiga, artikel Wasisto Rahajo Djati dengan judul “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”, Jurnal Sosiologi Volume 18 Nomor 2 tahun 2013. Artikel ini berfokus pada persaingan kekuatan familisme dalam pemerintahan lokal. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun temuan artikel ini adalah politik dinasti lokal memperkuat familisme akibat lemahnya institusi demokrasi dan rendahnya pendidikan politik. Praktik ini menciptakan patronase yang membuat demokrasi hanya prosedural tanpa menjadi inklusif.

Keempat, artikel milik Fitriyah yang berjudul “Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan pembentukan Dinasti Politik pada Pilkada” yang dimuat dalam Politika: Jurnal Ilmu Politik menjelaskan bahwa dinasti politik tidak terbentuk semata mata karena faktor budaya atau preferensi pemilih, tetapi sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen politik partai yang cenderung pragmatis. Partai

politik lebih memilih kandidat yang memiliki kedekatan dengan elite berkuasa karena dianggap memiliki elektabilitas tinggi, sumber daya, serta jaringan politik yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi elektoral justru dapat membuka ruang bagi keberlanjutan kekuasaan keluarga politik.

Kelima, artikel milik Halilul Khairi dengan judul “Menakar Pengaruh Politik Dinasti dalam pemilihan Kepala Daerah di Indonesia” Jurnal Wacana Politik Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Dengan Fokus penelitian pengaruh politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah politik dinasti memiliki pengaruh besar dalam pemilihan kepala daerah, terutama di wilayah dengan pendidikan politik rendah. Dinasti politik mempertahankan kekuasaan melalui mobilisasi sumber daya dan jaringan keluarga, namun dapat memperkuat klientelisme dan politik transaksional, yang melemahkan demokrasi lokal.

Keenam, buku karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot yang berjudul *Democracy for Sale: Election, Clientelism, and State in Indonesia* Tahun 2019. Buku ini membahas praktik klientelisme dalam demokrasi lokal di Indonesia. Kajian dalam buku ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus menganalisis hubungan antara kandidat politik dan pemilih yang dibangun melalui distribusi bantuan material, kedekatan personal, serta interaksi sosial. Hasil kajian dalam buku ini menunjukkan bahwa dukungan politik masyarakat seringkali terbentuk melalui relasi patron-klien di mana bantuan dan kedekatan sosial menjadi faktor penting dalam memperoleh dukungan elektoral.

Ketujuh, pemikiran Robert Michels dalam karyanya mengenai kecenderungan oligarki dalam organisasi politik menjelaskan bahwa dalam setiap organisasi politik menjelaskan bahwa dalam setiap organisasi, termasuk organisasi politik, terdapat kecenderungan kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil elite. Kajian ini menekankan bahwa pengambilan keputusan cenderung dikendalikan oleh elite yang memiliki akses terhadap sumber daya, informasi, serta struktur organisasi. Kondisi ini menyebabkan partisipasi anggota menjadi terbatas dan kekuasaan cenderung bertahan dalam lingkaran elite yang sama, meskipun sistem yang digunakan cenderung bersifat demokratis.

Kedelapan, kajian karya Vedi R. Hadiz mengenai politik oligarki di Indonesia. Kajian ini menganalisis bagaimana proses demokratisasi tidak serta-merta menghilangkan dominasi elite lama, melainkan membuka ruang bagi reproduksi kekuasaan oleh kelompok elite melalui institusi demokrasi itu sendiri. Hasil kajian ini menemukan bahwa elite yang memiliki sumber daya ekonomi, jaringan politik, serta akses kelembagaan mampu mempertahankan kontrol terhadap proses politik, termasuk dalam pencalonan dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, tema dinasti politik sudah banyak dikaji terutama dari sisi dampaknya terhadap demokrasi, perilaku pemilih atau praktik klientelisme. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus pada persepsi masyarakat terhadap tokoh dinasti politik yang kembali terpilih tanpa lawan, seperti Etik Suryani di pilkada 2024 di Sukoharjo. Selain itu meskipun konsep *elite capture* telah digunakan dalam berbagai kajian politik

lokal, penerapannya untuk menganalisis fenomena dinasti politik dari sudut pandang persepsi masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan *elite capture* penting untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat terus bertahan dalam lingkaran elite melalui legitimasi sosial dan politik yang terbentuk di tingkat masyarakat.

1.6 Teori

1.6. 1 Dinasti Politik

Dinasti menurut KBBI berarti keturunan raja raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Sedangkan politik memiliki arti segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dinasti politik dan politik dinasti merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Susanti (2017) dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan keturunan dari beberapa orang. Sedangkan politik dinasti adalah proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan.

Secara sederhana politik dinasti adalah proses regenerasi kekuasaan yang berfokus pada keluarga secara turun temurun. Meskipun proses demokratisasi tetap dijalankan pada pemilihan secara langsung oleh rakyat, kekuatan elit lama sangat kuat terlebih kekuatan elit lama didukung oleh loyalitas pendukung dan mereka memiliki sumber kekayaan yang melimpah. Sangat mungkin bagi elit lama dalam membangun kekuasaan yang berjenjang secara turun temurun tanpa

sepenuhnya menghilangkan nilai demokrasi tersebut. Dari beberapa pengertian diatas, dinasti politik dapat diartikan sebagai sistem regenerasi kekuasaan yang berfokus pada keluarga dengan mengandalkan keturunan dan dilakukan secara turun temurun. Kekuasaan berpindah bukan karena meritokrasi tapi mengedepankan hubungan kekerabatan.

Beberapa faktor yang membentuk dinasti politik adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Politik,

Menurut Almond & Verba (1990) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses pengenalan ke kultur politik. Produk akhirnya adalah seperangkat sikap kognisi, standar nilai, perasaan terhadap sistem politik dan terhadap pemegang peran. Sosialisasi politik merupakan suatu proses di mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian dengan pengetahuan itu seseorang bisa menentukan sifat persepsi persepsinya mengenai politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan, juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik.

Dikatakan oleh Rush & Alhoff (1986) bahwa sosialisasi politik merupakan hal yang paling penting dalam sistem sistem sosial-politik, tetapi tiap sistem dapat sangat berbeda dengan sistem lainnya. Melihat dari sudut pandang politik tertentu, sosialisasi politik sangat amat penting

dalam proses politik, yang mana berbagai macam individu dapat berpartisipasi dalam sistem politik.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah salah satu fungsi dari partai politik. Sistem rekrutmen merupakan hal yang sangat penting karena merupakan tahap awal bagi partai politik dalam mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya rekrutmen, nantinya akan diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya.

Namun permasalahannya adalah terdapat kecenderungan oligarkis dalam perekrutan ini. Meskipun tetap ada sistem rekrutmen formal, tetapi keputusan akhir tetap di tangan para elit partai. Sesuai yang dikatakan oleh Michels (1984) dalam bukunya Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi bahwa pengambilan keputusan selalu mengarah pada kecenderungan oligarkis. Dalam partai politik terdapat kecenderungan aristokrasi. Oleh karena itu proses rekrutmen politik dapat digunakan sebagai pembentukan dinasti politik.

Dalam Proses rekrutmen dan seleksi kandidat, terjadi kecenderungan ke arah pragmatisme di mana elite partai merekrut kandidat dari dinasti politik karena dipandang memiliki lebih banyak penguasaan sumber daya modal dan memiliki jaminan tingkat keterpilihan yang lebih tinggi dibanding calon lainnya. Petahana dianggap dapat lebih

mudah dalam memobilisasi semua simpul kekuatan politik untuk mendukung anggota keluarga selanjutnya sebagai suksesornya.

Masalah elitisme dalam pengambilan keputusan partai politik mengisyaratkan ada masalah pada demokrasi internal partai politik. Menurut Likoti (2005) kurangnya demokrasi internal partai politik tidak hanya melemahkan internal partai politik, tetapi juga mempengaruhi dan merugikan efektivitas dalam mengendalikan demokrasi nasional. Yang berarti jika demokrasi internal partai politik bermasalah maka sulit diwujudkan pula demokrasi nasional. Karena partai politik merupakan pilar utama demokrasi.

3. Institusionalisasi Partai Politik

Institusionalisasi atau pelembagaan merupakan proses perolehan nilai baku dan stabil yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tingkat pelembagaan sistem kepartaian dapat dilihat dari segi kemampuan. Menurut Huntington (1983) pelembagaan sistem kepartaian harus memiliki dua kapasitas. Pertama, partisipasi politik dilakukan melalui jalur partai, dengan menjauhkan dari semua aktivitas politik yang menjurus pada kekerasan. Kedua, yaitu menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok untuk dimobilisasi dengan maksud untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem partai politik.

O'Donnel dalam Harjanto (2011) memiliki pandangan mengenai pelembagaan partai politik dibagi menjadi dua aspek yaitu value infusion

dan behavioral routinization. Value infusion merupakan proses pergeseran fokus yang dilakukan oleh anggota dari berfokus untuk mengejar tujuan individu menjadi fokus pada tujuan besar organisasi atau partai. Mulai dari sini parpol dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan masyarakat, dan juga mengakarnya parpol (party rootedness). Sedangkan behavioral routinization terjadi jika terdapat pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan aturan dan norma norma secara formal dan informal tertanam dalam pola-pola tersebut sehingga terdapat prediktabilitas dan regularitas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus partai, maupun masyarakat luas lainnya. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, karena akan selalu ditemukan upaya pembajakan partai oleh segelintir elit maupun oligarki partai untuk kepentingan politik sempit mereka. Juga terkadang partai tidak bisa mengelola rutinisasi perilaku ini karena adanya dysfunctional factionalism yang membuat partai sulit dalam membangun hubungan yang solid dan tunggal akibat pertarungan antar faksi yang tajam.

Keterkaitan antara institusionalisasi partai politik dengan dinasti politik mengacu pada tesis O'Dwyer yang menyatakan bahwa terdapat kecenderungan partai politik membangun patronase politik karena lemahnya institusionalisasi partai. O'Dwyer menyatakan bahwa runaway state building didorong oleh politisi yang mencari patronase sumber daya bagi pembangunan partai. Hal ini terjadi karena pembangunan partai tidak diawali dengan pembangunan birokrasi. Dinasti politik terjadi lebih

disebabkan karena institusionalisasi partai yang lemah dan adanya institusionalisasi yang digunakan sebagai patronase sumber daya untuk kepentingan dan keberlangsungan partai politik yang bersifat pragmatis (Purwaningsih, 2015). Sehingga dalam proses kandidasi, partai politik lebih mengutamakan kandidat dari keluarga petahana untuk dicalonkan.

4. Patron klien

Menurut Scott patron-klien adalah hubungan pertukaran antara peran yang dapat didefinisikan sebagai bentuk khusus dalam hubungan dua orang yang melibatkan persahabatan instrumental yang besar dimana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan atau manfaat atau keduanya untuk orang yang berstatus lebih rendah (klien) yang untuk bagiannya, membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk jasa pribadi kepada patron. Hubungan patron-klien tidak hanya terbatas pada eksploitasi, tetapi sampai pada hubungan ketergantungan yang sangat tinggi. Ketergantungan yang dimulai dari satu aspek sosial umumnya berkembang menjadi ketergantungan yang luas dan mencakup beberapa aspek kehidupan sosial lainnya (Flynn, 1974).

Aspinall & Sukmajati (2016) mendefinisikan patronase sebagai pertukaran manfaat material yang dapat dibagi dengan dukungan politik. Dalam konteks elektoral, patronase dan klientelisme dipahami sebagai

relasi antara kandidat atau elite politik dengan pemilih yang dimediasi oleh distribusi sumber daya untuk tujuan mobilisasi suara. Dalam praktik politik lokal, patronase diwujudkan melalui distribusi sebagai sumber daya seperti uang tunai, barang, layanan sosial, maupun akses terhadap sumber daya negara. Praktik ini digunakan oleh kandidat dan elite politik sebagai strategi untuk memobilisasi dukungan elektoral selama kontestasi politik

Aspinall & Sukmajati (2016) menekankan bahwa relasi patronase tidak selalu bersifat pasti dan mengikat. Penerima bantuan dapat menafsirkan pemberian tersebut secara beragam, mulai dari menganggapnya sebagai kewajiban untuk membalas dengan dukungan politik hingga memandangnya sebagai gestur yang tidak mengikat. Oleh karena itu, pertukaran dalam relasi patron-klien bersifat problematis dan tidak menjamin timbal balik elektoral. Meskipun demikian, praktik patronase yang berulang dalam politik elektoral berkontribusi terhadap terbentuknya pola politik yang bersifat transaksional, yang dipandang sebagai tantangan bagi pendalaman demokrasi, karena ketergantungan pada distribusi sumber daya cenderung menghambat penguatan program dan ideologi politik.

5. Budaya Politik Familisme:

Familisme merupakan budaya politik sebagai ketergantungan yang terlalu besar kepada ikatan kekerabatan yang melahirkan kebiasaan menempatkan sanak famili dan ikatan kekerabatan lebih tinggi

dibandingkan kewajiban sosial lainnya (Djati, 2013). Dinasti politik menurut Djati terdapat tiga varian familisme, yaitu familisme, kuasi-familisme, dan egoisme familism.

a. Familisme

Familisme diartikan sebagai dinasti politik yang berdasarkan murni pada hubungan darah langsung dalam keluarga dan hubungan perkawinan dengan klan lainnya. Pendekatan familisme dalam membentuk dinasti politik didasari karena untuk menjaga keistimewaan politik yang telah diperoleh. Tiga poin penting familisme adalah loyalitas, kepatuhan dan solidaritas keluarga. Pola tersebut kemudian dihubungkan untuk komando saudara tua hingga saudara muda dalam jabatan publik.

b. Kuasi-Familisme

Kuasi-familisme berdasarkan pada sikap afeksi dan solidaritas dari anggota keluarga pada struktur kekuasaan. Afeksi berarti bentuk orientasi politik keluarga didasarkan pada regionalisme, lingkungan dan tribalisme sama dengan keluarga tersebut. Yang bisa diartikan dinasti politik pada budaya ini tidak hanya keluarga inti saja tetapi juga kepada keluarga lainnya yang tidak satu keturunan darah tetapi memiliki sistem kekerabatan yang berbasis artifisial. Dalam bentuk ini keluarga diidentifikasi dengan simbol simbol untuk mendapat legitimasi dari keluarga

lainnya. Identifikasi tersebut bisa dengan penggunaan nama keluarga, jalur perkawinan dan ritus keluarga lainnya. Yang mendasari model kuasi-familisme adalah penggalangan solidaritas oleh anggota keluarga baik dalam ranah formal maupun informal.

c. Egoisme-Familisme

Model ini berdasarkan pada aspek pemenuhan fungsionalisme dibandingkan dengan hanya menuruti ikatan darah dan garis keturunan. Konteks egoisme dipahami dalam dua aspek yaitu dari segi kepala daerah dan masyarakat. Dari segi kepala daerah yaitu kecenderungan mendahulukan anggota keluarga daripada publik untuk mengisi jabatan publik maupun suksesi pemerintahan. Umumnya hal ini dilakukan untuk mengamankan program maupun proses penganggaran yang telah dilakukan oleh kepala daerah yang digantikan.

Dari segi masyarakat, egoisme ditunjukkan dengan adanya kecenderungan status quo dari masyarakat agar keluarga tertentu tetap sebagai penguasa di daerahnya. Hal tersebut karena penguasa berhasil memperkuat dan membina hubungan sosial melalui serangkaian program kebijakan “gentong babi”. Dengan adanya program populis tersebut penguasa dapat menjalin hubungan romantis dan jejaring sosial secara efektif dan efisien dengan masyarakat. Pemerintah dianggap berhasil membuat kebijakan

populis maupun budaya permisif yang masih kental di masyarakat (Djati, 2013).

Kemudian menurut Rusnaedy (2020) terdapat tipologi dinasti politik, yakni:

1. Populism Dynasties, tipologi ini merupakan familisme dalam pemerintahan sebagai upaya untuk mengamankan program petahana. Tipologi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan aksi aksi heroik keluarga petahana saat waktu menjabat untuk berkampanye kerabat yang akan menggantikan. Dalam tipologi ini aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Karena masyarakatlah yang menjaga status quo kepemimpinan oligarki ini sebagai bentuk loyalitas dan afinitas terhadap redistribusi program populistis.
2. Octopussy Dynasties, merupakan tipologi dinasti politik berbasis jaringan kuasa. Tipologi ini dibentuk berdasarkan adanya figur karismatik dan sinergi antara aktor formal dan informal. Karakter rezim dinasti tipologi octopussy ini cenderung oligarki. Dinasti tipologi ini merupakan strategi politik kekerabatan yang dilakukan dengan terencana agar kerabatnya dapat menempati jabatan politik.
3. Tribalism Dynasties, merupakan tipologi dinasti politik yang berbasis kesukuan, marga dan kekeluargaan. Pola ini merujuk pada kebangkitan kekuatan lokal dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia. Pola

tribalism dynasties ini terjadi di mana budaya politik masih bersifat subjektif, karismatik, nepotisme, maupun oligarkis.

4. Feudalism Dynasties, tipologi ini jika dianalisis memiliki generalisasi yang sama, dibentuk berbasis figurasi dan patrimonialisme, aji mumpung dan elitisme. Yogyakarta merupakan daerah yang “murni” dinasti politik, yang merupakan keberlanjutan dari masa kerajaan sebagai pemberian keistimewaan oleh pemerintah pusat.
5. Consensus Dynasties, tipologi ini bisa dilihat pada daerah Klaten di mana daerah Klaten dikuasai oleh dua keluarga. Dimana dua keluarga tersebut secara bergantian menguasai daerah sebagai hasil kompromi antara kedua keluarga. Kompromi antar keluarga termasuk membahas penentuan posisi jabatan secara bergiliran (bupati/wakil bupati) (Rusnaedy, 2020).

1.6. 2 Teori *Elite Capture*

Elite capture merupakan fenomena dimana elite menguasai atau mendominasi seseorang atau suatu kelompok dengan menjadikan kepentingan pribadinya sebagai tujuan untuk menjalankan sebuah institusi (Firdaus, 2018). Dimana *elite capture* sebagai individu yang menempati posisi strategis mengambil semua sumber daya yang ada dengan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya (Musgrave & Wong, 2016). Bisa diartikan *elite capture* adalah usaha yang dilakukan para elite untuk mengambil alih sumber daya dengan memanfaatkan posisi yang dimiliki untuk mendominasi seseorang atau kelompok agar kepentingan pribadi

tercapai dengan memanfaatkan institusi sehingga keuntungan didapatkan oleh mereka sendiri.

Dinasti politik merupakan hasil nyata teori *elite capture* itu sendiri. Dalam konteks dinasti politik, *elite capture* terjadi ketika keluarga atau kelompok dinasti memanfaatkan posisinya untuk melanggengkan kekuasaan mereka, mengendalikan agenda pembangunan, penganggaran dan kebijakan publik, mendistribusikan bantuan, proyek atau jabatan kepada mereka yang loyal dan mereka juga mampu membatasi akses masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam proses politik maupun pengawasan publik. Praktik *elite capture* dalam konteks dinasti politik memungkinkan penguasaan sumber daya dan pengendalian institusi secara berkelanjutan dan sistemik oleh keluarga elite, mengubah demokrasi lokal menjadi sistem yang eksklusif dan tertutup. Ini terjadi karena aktor politik dari lingkaran dinasti politik tidak hanya memonopoli kekuasaan formal tetapi juga membangun kekuasaan informal yang sulit ditembus oleh masyarakat umum maupun aktor politik lain (Muksin dkk., 2024; Rusnaedy, 2020)

Pada kasus Kabupaten Sukoharjo, Etik Suryani menjabat sebagai bupati setelah suaminya yaitu Wardoyo Wijaya. Hal ini menunjukkan Etik merupakan aktor politik yang terafiliasi dengan dinasti politik. Kondisi Etik dapat memperkuat praktik *elite capture* apabila kekuasaan yang dijalankan lebih menguntungkan kelompok elite tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan. Persepsi masyarakat terhadap Etik Suryani sebagai bupati menjadi indikator penting untuk mengukur apakah *elite capture* benar-benar terjadi pada masa

kepemimpinannya. Jika menurut masyarakat pengambilan kebijakan di masa Etik Suryani terkesan tertutup, kemudian distribusi proyek tidak merata dan partisipasi publik dibatasi, maka hal ini merupakan tanda adanya tindakan *elite capture* dalam kepemimpinan Etik Suryani yang dibungkus dalam legitimasi dinasti politik.

1.6. 3 Persepsi

Operasionalisasi konsep adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel yang diobservasi dapat diukur (Wisadirana, 2005). Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep persepsi. Persepsi menurut Walgito, (2001) merupakan suatu proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses tersebut tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut dapat diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Menurut Secord dan Backman dalam Azwar (1995) sikap terbagi menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Komponen kognitif (pemikiran). Komponen ini terdiri dari pengetahuan. Dari pengetahuan ini membentuk keyakinan dan pandangan tertentu terhadap suatu objek atau sikap.
2. Komponen afektif, Komponen ini berhubungan dengan perasaan senang maupun tidak senang sehingga bersifat evaluatif, yang mana mempunyai hubungan erat dengan sistem nilai yang dimiliki oleh pemilik sikap.

3. Komponen konatif, Komponen ini memiliki hubungan dengan kecenderungan berperilaku tertentu tergantung dengan sikap yang dimiliki individu.

Kemudian variabel yang perlu didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

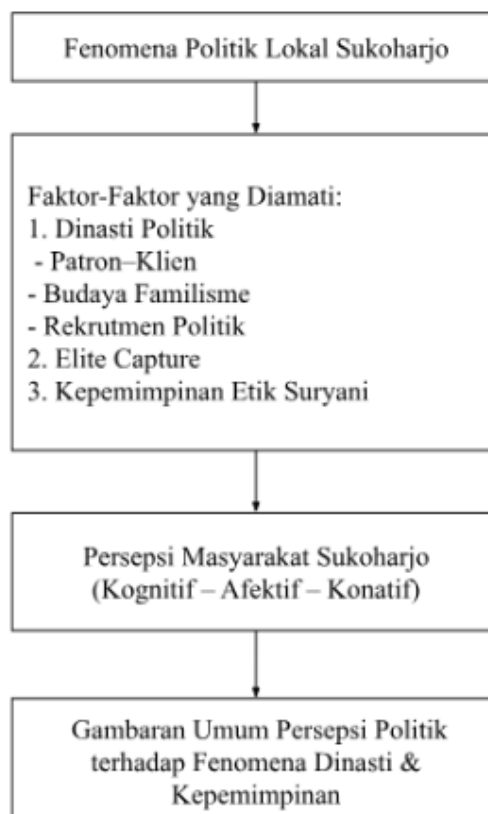
Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran	Skala
Persepsi Masyarakat	Kognitif	Pengetahuan tentang dinasti politik	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
	Afektif	Sikap terhadap kandidat dinasti politik	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
	Konatif	Alasan cenderung memilih Etik Suryani di Pilkada 2024	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
Dinasti Politik	Sosial-politik	Partisipasi dalam diskusi politik	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
	Rekrutmen Politik	Persepsi masyarakat terhadap proses pencalonan	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
	Patron-Klien	Hubungan antara kandidat dan pendukung berdasar kepentingan material	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
	Budaya Familisme	Kecenderungan masyarakat mendukung kandidat karena hubungan keluarga	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
	Dampak Dinasti Politik	Penilaian masyarakat terhadap dampak positif/negatif dinasti politik terhadap kinerja	Pernyataan kuesioner	Skala Likert

		Etik Suryani		
	Kepemimpinan	Penilaian masyarakat terhadap kinerja Etik Suryani sebagai pemimpin yang terafiliasi dinasti politik.	Pernyataan kuesioner	Skala Likert
<i>Elite capture</i>	Akses terhadap kekuasaan	Pesepsi bahwa kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir elite	Pertayaan kuesioner	Skala Likert
	Dominasi keluarga politik	Persepsi bahwa keluarga mantan pejabat mendominasi pencalonan kepala daerah	Pertayaan kuesioner	Skala Likert
	Pengaruh simbolik	Persepsi bahwa nama besar atau warisan politik memengaruhi pilihan pemilih	Pertayaan kuesioner	Skala Likert
	Pemanfaatan jaringan	Persepsi bahwa jaringan kekuasaan dimanfaatkan untuk mempertahankan posisi	Pertayaan kuesioner	Skala Likert

1.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan teori dinasti politik untuk menjelaskan pola kekuasaan Etik Suryani sebagai bagian dari keluarga petahana. Teori *elite capture* digunakan untuk menjelaskan bagaimana keluarga elite memanfaatkan kekuasaan untuk mempertahankan dominasi sumber daya dan pengaruh politik. Persepsi masyarakat terhadap hal ini diukur melalui tiga dimensi utama yaitu, kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan konatif (tindakan/motivasi memilih). Keterkaitan antara teori dinasti politik dan *elite capture* dianalisis melalui persepsi masyarakat terhadap dominasi kekuasaan keluarga Etik Suryani, akses terhadap sumber daya publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik di Pilkada Sukoharjo 2024.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. (Sugiyono, 2009) mengartikan metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan keadaan variabel sebagaimana adanya berdasarkan hasil pengukuran numerik.

Penelitian kuantitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner berskala Likert untuk memperoleh data persepsi masyarakat mengenai dinasti politik, kepemimpinan Etik Suryani dan *Elite Capture* di Kabupaten Sukoharjo. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara statistik deskriptif untuk menunjukkan kecenderungan jawaban responden, seperti rata-rata (mean), frekuensi, dan kategori persepsi. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran empiris dan terukur mengenai bagaimana masyarakat Sukoharjo memandang fenomena dinasti politik dan kepemimpinan lokal.

1.9.2 Populasi dan Sampel

1.9.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang berdomisili di wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru yang merupakan peserta pemilih Pilkada Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU adalah 684.491 pemilih.

Alasan peneliti memilih wilayah Kabupaten Sukoharjo karena wilayah tersebut memiliki dinamika politik yang khas, terutama terkait keberlanjutan kekuasaan melalui jalur dinasti politik. Kasus kemenangan Etik Suryani sebagai Bupati, yang memiliki hubungan dengan Wardoyo, mantan bupati sebelumnya. Fenomena dinasti politik di tingkat kabupaten lebih mudah diamati karena cakupan yang lebih kecil dibanding tingkat provinsi atau nasional. Dengan cakupan yang lebih kecil peneliti dapat lebih dalam untuk menggali persepsi masyarakat terhadap dinasti politik dalam konteks lokal.

1.9.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini sampel diperoleh dari populasi masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 684.491 jiwa (DPT Pilkada 2024).

Penentuan jumlah sampel atau responden pada penelitian ini menggunakan Rumus Cochran (Sugiyono, 2015) berikut ini:

1. Rumus Cochran sampel awal (n_0)

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2}$$

Keterangan:

n_0 : Jumlah sampel awal

Z: Nilai z (untuk tingkat kepercayaan 95% $\rightarrow$ 1,96)

p: proporsi populasi

q: $1 - p = 0,5$

e: margin of error (10%)

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2} = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{(0.10)^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.25}{0.01} = \frac{0.9604}{0.01} = 96.04$$

2. Koreksi untuk populasi terbatas (N = 684.491)

Cochran dilanjutkan dengan:

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{(n_0 - 1)}{N}} = \frac{96.04}{1 + \frac{95.04}{684.491}} = \frac{96.04}{1 + 0.00014} = 95.99$$

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 96 responden. Untuk mempermudah analisis dan mengantisipasi data tidak layak, sampel dibulatkan menjadi 100 responden.

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobability sampling dengan metode *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebagai responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui peneliti cocok sebagai sumber data dengan kriteria utama (Sugiyono, 2018). Metode ini dipilih karena responden ditentukan berdasarkan kemudahan akses serta kesediaan masyarakat kabupaten Sukoharjo untuk mengisi kuesioner penelitian melalui Google Form, dengan tetap memenuhi kriteria sebagai pemilih yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Cochran untuk memperoleh ukuran sampel minimum yang memadai secara statistik, sehingga diperoleh 100 responden. Meskipun teknik *convenience sampling* tidak

memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi, pendekatan ini tetap dapat memberikan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap fenomena yang diteliti.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

1.9.4.1 Jenis Data

Pada penelitian penulis menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Dari simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Nilai data bisa berubah-ubah atau bersifat variatif.

1.9.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang telah dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian. Oleh karena itu sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar kepada para responden. Adapun yang menjadi responden adalah masyarakat yang termasuk dalam DPT Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2024.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh instansi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa

buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan dinasti politik di tingkat kabupaten.

1.9.5 Skala Pengukuran

Instrumen penelitian ini dalam penilaian skor dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan empat skala, yaitu:

- a. Jika memiliki jawaban sangat setuju diberi skor 4
- b. Jika memiliki jawaban setuju diberi skor 3
- c. Jika memiliki jawaban tidak setuju diberi skor 2
- d. Jika memiliki jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Dua hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data penelitian. Karena dua hal tersebut mempengaruhi data hasil penelitian. Kualitas instrumen penelitian berkenaan validitas dan reliabilitas instrumen. Sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan untuk mendapatkan responden. Responden nantinya akan diberi beberapa pertanyaan dan menjawab dengan pilihan yang telah tercantum. Responden dapat memilih satu jawaban yang sesuai dengan mereka. Pengumpulan data melalui kuesioner dalam penelitian ini menggunakan masyarakat yang telah menjadi DPT pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai respondennya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan berbagai sumber tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, dan catatan harian. (Suharsimi Arikunto, 1992). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil data data dari dokumentasi yang ada di KPU Kabupaten Sukoharjo dan data yang tersedia di internet.

1.9.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian berupa kuesioner perlu diuji untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mampu mengukur konsep yang

diteliti serta memberikan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap seluruh butir pertanyaan.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan teknik korelasi Pearson Product Moment menggunakan bantuan program SPSS. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada tingkat signifikansi 5%.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi internal instrumen. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini disajikan pada BAB III bagian pembahasan.

1.9.8 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pada penelitian ini, Kuesioner yang telah diisi oleh responden akan dikembalikan kepada penulis, kemudian penulis akan memeriksa kelengkapan jawaban kuesioner. Apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab maka

kuesioner akan dikembalikan kepada responden agar jawaban responden menjadi sah. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan menjadi langkah terakhir dalam teknik analisis data. Dengan mengaitkan hasil data yang telah didapatkan dan dengan teori teori maka akan dapat ditemukan kesimpulan hasil. Pada kesimpulan data yang berupa angka dari hasil kuesioner dijelaskan dalam bentuk kalimat.